

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, harus mematuhi aturan dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan perbaikan sistem dan kelembagaan untuk membangun tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, dan sesuai dengan Pasal 23C amanat UUD Pedoman utama untuk mengelola keuangan negara, termasuk prinsip-prinsip tahunanitas, universalitas, persatuan, dan spesialisasi, harus ditetapkan. Pedoman ini diuraikan dalam Konstitusi. Selain standar tersebut, ada pedoman lain yang harus diikuti saat mengelola uang negara. Akuntabilitas yang mengedepankan hasil, profesionalisme, proporsionalitas, transparansi dalam pengelolaan uang negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa fundamental. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas secara independen adalah laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, sebanding, dan dapat dipahami.

Relevan karena pengetahuan yang dikandungnya mungkin memiliki dampak

Dengan membantu pengguna dalam membuat penilaian dengan mengevaluasi peristiwa sebelumnya, saat ini, dan membuat prediksi tentang masa depan, serta dengan memvalidasi atau mengoreksi temuan pemeriksaan mereka sebelumnya, data yang dapat diandalkan dalam laporan keuangan yang bebas dari kesalahan signifikan dan dengan jujur menyatakan semua fakta yang relevan, dan dapat diverifikasi dapat dievaluasi sehubungan dengan laporan keuangan dari

periode waktu sebelumnya. Dapat dimengerti menunjukkan bahwa itu dapat digunakan oleh pengguna dan dapat diekspresikan dalam bahasa dan bentuk.

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang Tahun 2010 (PP 71).

Kepatuhan terhadap aturan akuntansi dan dukungan yang diberikan oleh sistem akuntansi yang dapat dipercaya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas akun keuangan pemerintah. Karena itu, format dan informasi dalam laporan akuntabilitas

salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah yang berupa standar akuntansi pemerintah (SAP). Sesuai dengan pasal 32 UU No 17 Tahun 2003 tentang bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaba pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun serta disajikan sesuai dengan SAP. Berkenan dengan hal tersebut ditegaskan juga dalam pasal 4 ayat (1)PP No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah haruslah menerapkan SAP berbasis akrual.

Implementasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, jika implementasi pengelolaan keuangan baik maka kualitas laporan keuangannya sangat baik. kantor camat bajo Hal ini telah memperjelas bagaimana pengelolaan keuangannya diterapkan. Anggaran operasional, misalnya, telah disajikan secara transparan dan relevan

dalam rangka memberikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dalam perumusan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan, dan pelaporan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi faktor utama yang berdampak pada kualitas akun keuangan (SAP). Sesuai dengan peraturan, pengelolaan keuangan yang prudent dalam rangka pemerintahan, dan audit tahunan atas laporan keuangan, Kantor Kecamatan Bajo menyusun laporan keuangan sesuai dengan kementerian keuangan dan mempresentasikannya sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Sumber daya manusia yang berkualitas di kantor kecamatan Bajo didukung oleh sejarah di bidang akuntansi, kehadiran rutin di kelas dan sesi pelatihan, dan keahlian keuangan sebelumnya. Faktor-faktor ini semua berkontribusi pada manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber daya yang baik akan dapat memahami dan menggunakan logika akuntansi secara efektif. Kegagalan sumber daya manusia untuk menggunakan penalaran akuntansi akan mempengaruhi seberapa akurat laporan keuangan dihasilkan dan jika laporan tersebut sesuai dengan kriteria pemerintah (Warisno, 2008). Masalah kualitas laporan keuangan harus diperhatikan, dan banyak orang saat ini sedang mendiskusikannya.

Misalnya, masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kuantitas rekening keuangan pemerintah daerah yang berkualitas buruk. Pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah yang tidak memadai selama penyusunan laporan keuangan tersebut adalah kemungkinan penyebabnya. Penerapan Sistem Manajemen Keuangan dan Akuntansi & Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang signifikan dan integral dari kaliber informasi keuangan, dapat ditingkatkan

mengingat masalah-masalah yang disebutkan di atas. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi, kantor kecamatan bajo harus menyusun, membuat, mengelola, dan memelihara laporan keuangan yang sehat.

1.2 Merumuskan Masalah

Mengingat konteks historis masalah tersebut di atas, rumusan masalah sebagai berikut adalah penelitian:

1. Bagaimana pengaruh Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo
2. Bagaimana pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo
3. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo

1.2 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penyelidikan ini:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kantor Camat Bajo
2. Untuk menguji pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo
3. Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Implementasi Pengelolaan Keuangan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Bagi para sarjana, diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada kantor camat bajo kabupaten luwu.
2. Diharapkan kinerja keuangan Perseroan di kantor kecamatan Bajo akan diperhitungkan ketika menentukan strategi peningkatan kinerja keuangan dan mengevaluasi keakuratan laporan keuangan di kantor. camat bajo kabupaten luwu.
3. Diharapkan akan menjadi bahan bacaan dan referensi bagi peneliti lain, khususnya untuk bekerja pada dampak manajemen keuangan dan tata kelola terhadap kaliber laporan di tempat kerja. camat bajo kabupaten luwu

1.5 Tujuan dan Batas-Batas

Dukungan Keuangan Desa Penelitian Keuangan desa menurut Undang-undang desa adalah semua yang berkaitan dengan menjalankan hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang, barang, dan hal-hal lain yang dapat dinilai dari segi uang. hak dan tanggung jawab menghasilkan pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan yang harus diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas adalah bagian dari desa siklus pengelolaan Keuangan. karena sumber daya yang terbatas (alat, waktu) untuk penelitian maka dari itu peneliti hanya membahas beberapa sub-sub yang terdapat di rumusan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Ini termasuk konteks, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan, ruang lingkup, dan keterbatasan penelitian dan penulisan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang di mana membahas tentang teori-teori, pengertian, faktor yang mempengaruhi, dan juga pendapat-pendapat para ahli.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, alat penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang mencakup temuan penelitian dalam hal deskripsi data dan proposal hipotesis, serta pembahasan temuan kualitatif dan kuantitatif.

BAB V PENUTUP

Yang di mana membahas tentang simpulan dan saran

DAFTAR RUJUKAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) didefinisikan sebagai "prinsip standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan rekening keuangan pemerintah" sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana didefinisikan oleh Mardiasmo (2009), adalah "aturan atau prinsip yang mengendalikan perlakuan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan untuk pelaporan kepada pengguna." Aturan Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengawasi akuntansi pemerintah Indonesia. Kesimpulan: Dalam upaya menaikkan kaliber

laporan keuangan pemerintah di Indonesia, SAP merupakan persyaratan dengan bobot hukum. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan akuntabel, diharapkan laporan keuangan pemerintah yang merupakan produk dari proses akuntansi dapat digunakan sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan. SAP berfungsi sebagai standar untuk mengoordinasikan perspektif pengguna, auditor, dan kompuler.

Baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan menggunakan SAP. Pengguna laporan keuangan, seperti legislatif, akan menggunakan SAP untuk memahami data dalam laporan keuangan, dan auditor eksternal Badan Audit akan menggunakannya sebagai standar saat melakukan audit. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 No. 71 yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Menurut administrasi, laporan pemerintah tidak dimaksudkan untuk secara langsung menjawab tuntutan pemakainya melainkan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan yang luas. Entitas pelaporan memiliki opsi untuk memberikan laporan keuangan yang disusun untuk persyaratan tertentu di samping laporan keuangan tujuan umum. Jika perlu, laporan keuangan tujuan khusus dapat disiapkan selama mengikuti pedoman Pemerintah Standar Akuntansi. Laporan keuangan "dibuat untuk menawarkan informasi terkait mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan

oleh perusahaan pelapor untuk satu periode pelaporan," menurut Cape (2008: 8-9).

Praktik terbaik di tingkat internasional disebut sebagai "Pengembangan SAP," menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), "sambil tetap mempertimbangkan kondisi di negara ini, baik hukum maupun praktik akuntansi saat ini." SAP adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dipraktikkan. negara Menurut pasal 32 ayat (2), setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, komite standar yang independen dan dibentuk oleh peraturan pemerintah mengembangkan standar akuntansi pemerintahan.

Prinsip Akuntansi

Landasan hukum aparatur pemerintah pusat adalah pemerintah. Untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas, daerah harus mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dengan tetap menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan standar akuntansi pemerintah lainnya meliputi:

1. Akuntabilitas, khususnya akuntabilitas untuk alokasi sumber daya dan pengelolaan keuangan.
2. Manajemen, yang memungkinkan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan aset, kewajiban, dan pemerataan uang publik.

3. Transparansi, atau memberikan pengungkapan penuh kepada pemangku kepentingan atas semua informasi keuangan yang relevan.
4. Saldo antargenerasi, yang memberikan data apakah pendapatan pemerintah cukup untuk menutupi pengeluaran penuh.

c. Penggunaan standar akuntansi Pemerintah

Ketika mengumpulkan dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintah federal dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mematuhi aturan akuntansi pemerintah. Untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan, dakam harus menghasilkan akun keuangan yang berkualitas tinggi bagi pemerintah pusat dan daerah. Melalui rilis informasi keuangan dengan kualitas yang cukup, perilaku buruk pemerintah dilaporkan.

Standar Akuntansi Pemerintah tunduk pada batasan hukum yang sama dengan undang-undang dan peraturan lainnya. Tujuan utama penerapan standar akuntansi pemerintah adalah untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh konsumen, mencegah kesalahpahaman antara pihak-pihak yang memberikan informasi dan pengguna lembaga keuangan, untuk melaporkan keseragaman, yang akan memberikan laporan keuangan kemampuan untuk berdiri di pengadilan. Pelaporan keuangan memiliki standar yang lebih tinggi dengan persyaratan akuntansi pemerintah. Mahmudi (2010): 29

d. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman yang dipahami dan dipatuhi oleh pembuat standar, mereka yang bertanggung jawab atas akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan tugasnya, dan

pengguna laporan. keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Darise (2012 : 55) dapat dijelaskan prinsip akuntansi yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Yayasan Akuntansi Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca sedangkan basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Jumlah pengeluaran tunai dan setara kas yang dibuat atau jumlah nilai wajar insentif untuk membeli aset pada akuisisi dicatat sebagai nilai historis aset. Kas dan setara kas yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban ke depan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan direpresentasikan sebagai kewajiban..
3. Pemerintah telah menyadari bahwa pendapatan dasar kas yang saat ini tersedia telah diizinkan melalui anggaran pemerintah untuk periode akuntansi dan akan digunakan untuk membayar kembali hutang dan menutupi pengeluaran selama periode tersebut.
4. Zat Berkinerja Baik Bentuk Resmi Ketika suatu transaksi atau peristiwa lain dimaksudkan untuk secara adil mengirimkan yang lain yang harus disediakan, penting untuk mencatat dan menyajikannya sesuai dengan substansi dan bukan hanya formalitas. Jika transaksi aktual atau kejadian lain berbeda secara signifikan dari formalitas yang terlibat, hal itu dapat dinyatakan secara eksplisit dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Keteraturan Untuk mengukur kinerja entitas pelaporan dan menentukan posisi sumber daya yang dimilikinya, operasi akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi periode pelaporan.

6. Keandalan Jika metode yang baru ditetapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik daripada cara saat ini, teknik akuntansi dapat diubah. Faktor-faktor yang telah mengubah cara pendekatan ini diterapkan disebutkan dalam pernyataan laporan keuangan.

7. Transparansi Penuh Laporan keuangan memberi pengguna semua informasi yang mereka butuhkan. Laporan front sheet keuangan atau Notes to Financial Statements dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan.

8. Informasi Akuntansi yang Disajikan Secara Kredibel disajikan secara adil.

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2 Implementasi Pengelolaan Keuangan

Kata bahasa Inggris "implement" adalah tempat ide implementasi berasal. Menerapkan sesuatu berarti memberikan efek praktis, menurut Kamus Besar Webster (Webster dalam Wahab), dan menyediakan sarana untuk melaksanakan (sesuatu) (2006: 64). Selain definisi yang diberikan oleh Webster di atas, Van Meter dan Van Horn memberikan definisi implementasi sebagai berikut: "Tindakan yang berhasil dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau pihak swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang diuraikan dalam

keputusan kebijakan" (Van Meter dan van Horn dalam Wahab,2006:65). Sekretariat Komisi Pemilihan Umum mendefinisikan pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai "tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan keuangan oleh individu pejabat pemerintah atau kelompok yang berada di lingkungan tersebut dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan, yaitu keputusan Nomor KPU." 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, 94/Kpts/KPU.

a. Membuat Anggaran Keuntungan dari penganggaran meliputi:

1. adalah adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan strategi bisnis dan untuk melakukan kontrol umum atas kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, anggaran adalah alat manajemen untuk perencanaan dan pemantauan.
2. Sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan tugas bisnis. Anggaran dapat menawarkan saran bermanfaat kepada manajemen puncak dan manajemen menengah. Bawahan akan melihat bahwa manajemen memiliki pemahaman yang kuat tentang organisasi ketika mereka melihat anggaran yang dirancang dengan baik.
3. Untuk memudahkan koordinasi kerja. Koordinasi tugas internal perusahaan dapat ditingkatkan dengan penganggaran. Sistem anggaran memberikan ilustrasi perusahaan operasi secara keseluruhan..
4. Sebagai alat pengawasan kerja. Untuk mengevaluasi aktivitas apa pun karena keefektifannya, anggaran harus mencakup tujuan yang dapat dibandingkan dengan realisasinya.

5. Sebagai cara untuk menilai operasional perusahaan. Operasional perusahaan dapat ditingkatkan dengan menentukan tindakan yang harus diambil untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang memuaskan menggunakan anggaran yang telah dibuat dengan standar yang baik dan sedang dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Anggaran

Rilis Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran/DIPA menandai dimulainya pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat. DIPA harus diberikan kepada unit kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian dan lembaga segera setelah tahun anggaran (1 Januari) dimulai. Mengikuti sistem dan prosedur akuntansi, anggaran dijalankan. Ada tiga hal yang diperlukan untuk sistem ini, yaitu:

1. Untuk menetapkan proses yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait untuk membuat pembagian kerja dan tugas mereka menjadi jelas.
2. Untuk menerapkan kontrol internal untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
3. Membuat laporan keuangan bagi pemerintah yang mematuhi persyaratan akuntansi pemerintah.

c. Akuntansi dan Manajemen

Secara umum, ada dua kategori kegiatan administrasi keuangan, yaitu:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan korespondensi, manajemen, ekstraksi surat, penyimpanan surat, atau pengarsipan dokumen lainnya harus berada di bawah lingkup administrasi umum.

2. Administrasi Keuangan, atau pembukuan, adalah seperangkat tugas keuangan yang dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan untuk memberikan informasi keuangan.

d. pelaporan, tanggung jawab, dan pengawasan

Pelaporan keuangan diatur untuk memberikan rincian terkait tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pelapor selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis situasi keuangan, menentukan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaan manajemen keuangan, dan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk operasi bisnis.

2.3 Financial Statement Quality

a. Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu entitas dapat dilakukan melalui laporan keuangan. Untuk dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan bisnis lain, laporan keuangan yang dikeluarkan harus disusun sesuai dengan aturan akuntansi yang sesuai.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif

laporan keuangan yaitu :

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan berarti informasi yang disajikan dengan tepat waktu dan lengkap sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan.
2. Andal, menyajikan informasi dengan fakta yang jujur, dan dapat divertifikasi, juga menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan yang material.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

b. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan cara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik yang diperoleh dari pajak, pungutan, atau transaksi lainnya. Mereka adalah ringkasan dari pencatatan proses dan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama

tahun yang dicakup oleh buku yang dimaksud. Bentuk laporan keuangan pemerintah ini berisi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah untuk satu periode

dan akuntabilitas pelaksanaan APBN. Keakuratan laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh sejumlah variabel, dan laporan keuangan yang akurat menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab manajemennya sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dibandingkan dengan laporan keuangan sektor swasta, laporan keuangan sektor publik memiliki tujuan yang berbeda. Menurut Badan Standar Akuntansi Pemerintah (2009), tujuan laporan keuangan swasta adalah untuk mengukur laba, namun tujuan laporan keuangan publik adalah

1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya.
2. Melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan

2.5 Indikator Standar Akuntansi (SAP)

Menurut Indara Bastian (2010:137) SAP memiliki indikator adalah sebagai berikut:

1. Regulasi
2. Sumber daya manusia
3. Infrastruktur dan layanan pendukung

Sejumlah indikator SAP telah disediakan oleh Anggota IKAPI (2011: 262), termasuk yang berikut:

1. Yayasan Akuntansi
2. Pentingnya Sejarah

3. Pengakuan
4. Zat berkinerja lebih baik daripada bentuk formal
5. Keteraturan
6. Konsisten
7. Pengungkapan Kelengkapan
8. Tampilan yang dapat dipertahankan

Penelitian ini menggunakan indikator standar berdasarkan pendapat yang disebutkan di atas.

Akuntansi pemerintah, yaitu regulasi, harus mematuhi kebijakan, memiliki sistem dan pendukung yang tepat, dan sumber daya manusia yang sadar dan mampu menerapkan standar akuntansi tersebut.

2.6 Hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan konsep akuntansi yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah akan membuat akun keuangan penting di lingkungan pemerintah setelah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan laporan keuangan yang handal dan akurat yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diharapkan semuanya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan secara terorganisir dengan tetap menggunakan standar akuntansi pemerintah.

b. Pengaruh Penerapan Pengelolaan Keuangan terhadap Keandalan Laporan Keuangan Administrasi keuangan menjadi landasan pengelolaan keuangan. Perencanaan, manajemen, dan tanggung jawab untuk setiap fase dirancang dengan benar sehingga kinerja yang diantisipasi juga meningkat. Transparansi dan akuntabilitas harus digunakan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dimungkinkan jika organisasi pemerintah dapat menghasilkan, mengelola, dan menjaga laporan keuangan yang akurat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Nama,Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
------	----------------	------------------	---------------------	------------------

1.	Muhammad Azwan (tahun 2015)	Penerapan Standar Akuntansi Aparatur Pemerintah untuk Pengaruh Sektor Pemerintah Dan Tata Kelola Yang Efektif Untuk Kualitas Laporan Keuangan tFinance in acity Semarang.	Independen: (x) Tata kelola pemerintahan yang baik, akuntansi standar, dan aparatur pemerintah yang berkualitas tinggi. Bergantung pada: (y) Qualityreportfinance.	Apakah memiliki dampak substansial pada aplikasi variabel, akuntansi standar, infrastruktur pemerintah untuk memastikan kualitas, dan tata kelola yang baik?reportfinance.
2.	Kuzuma 2012	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya	Independen (x) : Penerapan standar akuntansi pemerintahan Dependen (y) : Kualitas laporan keuangan	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3.	Tua.S Manuppan Bangun 2015	pengaruh <i>Good Governance</i> . Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan (studi empiris	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan penelitian ini secara keseluruhan adalah 0,7Mencermati bahwa tata kelola yang baik, kompetensi sumber daya, kekuatan manusia, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi 77,1% kualitas informasi dalam

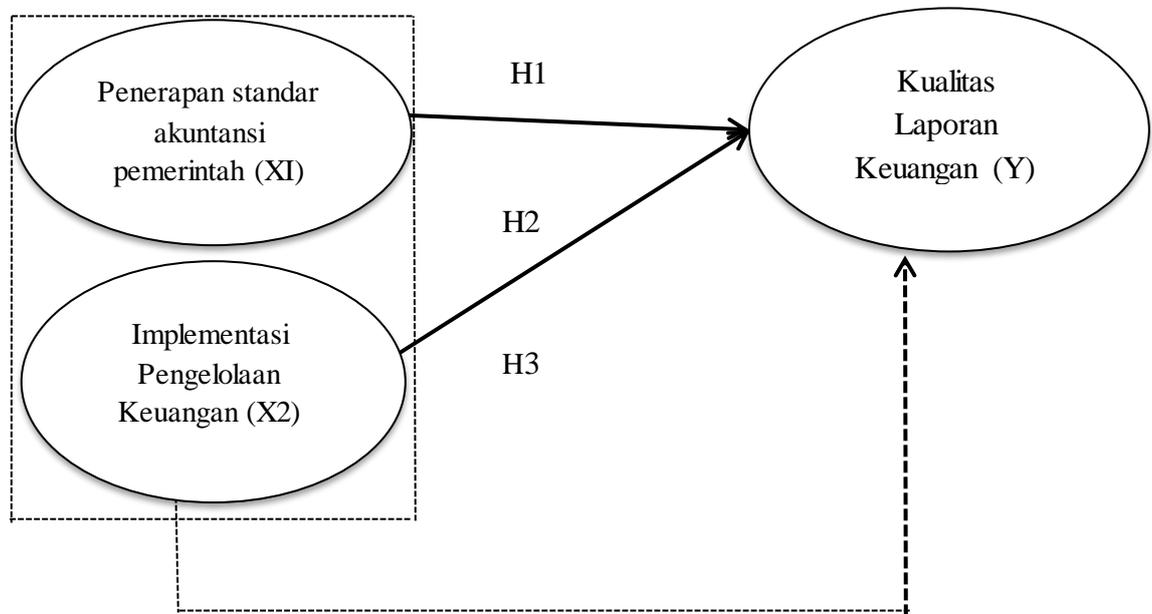
		pada SKPD kota Dumai)”. laporan keuangan, sedangkan faktor variabel yang tersisa seperti pemanfaatan menyumbang 22,9%. operasi perangkat71 yang		
4.	Subaweh dan Nugraheni (2008)	Pengaruh Ke arah kualitas laporan keuangan, standar akuntansi keuangan	Infrastruktur Tergantung: Ketersediaan Keuangan Laporan Kualitas Tergantung: Aplikasi Manajer Pengetahuan SAP	Ada dampaknya terhadap Implementasi SAP yang Signifikan di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menuju Peningkatan Kualitas Laporan.
5.	Pravitasari eka ningtyas dan dini widyawati (2015)	Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Terdapat penerapan standar akuntansi pemerintahan pada satuan kerja perangkat daerah sudah sangat efektif
6.	Ovita Charolina 2013	Pengaruh Impementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Prov Bengkulu.	Independen (x) : implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja. Dependan (y) : Kualitas Laporan Keuangan	Bahwa implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas
7.	I Wayan	Pengaruh	metode	Menurut hasil uji T,

	Karsama, I Gusti Ngurah Agung Suaryana, 2017	efektivitas penerapan SAP, kompetensi SDM dan pada kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bangli	datayang digunakan adalah metode survey menggunakan kuesioner	standar akuntansi Effectiveness Application pemerintah memiliki regresi 0,175 dengan T dihitung sebesar 2.991 dan nilai yang signifikan sebesar 0,005,kurang dariderajat substansial0,05
8.	Azlim s 2012	Mempengaruh i penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan standar dalam akuntansi, pemerintahan, dan sektor keuangan di kota. Aceh, Banda	Tata kelola yang baik, akuntansi standar, dan pemerintahan bersifat independen (x). Kualitas laporan keuangan tergantung.	keuangan. bahwa pemerintah menerapkan standar tata kelola dan akuntansi yang kuat beserta laporan keuangan SKPD yang berkualitas di Banda Aceh.
9.	Susilawati Dan Dwi Seftihani Riana (2014)	Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif	Sistem dan Akuntansi Standar Pemerintah Laporan Pengendalian Mutu Internal Membiayai Daerah Kuat Pemerintah Ketika tidak simultan atau parsial, itu akanDoneTestingop posed ke garis-garisada hipotesis declineutilizing
10	Mia oktarina, Kharis Raharjo dan Rita andini	engaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan,	Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif	deskriptif Terdapat pengaruh yang kuat antara karakteristik

	(2014)	kualit as apatur pemerintahan daerah dan goodgovernan ce terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang		sample yng digunakan dalam penelitian
--	--------	---	--	---

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual studi ini berfokus pada tantangan manajemen dan keuangan utama. Sebagai bagian dari implementasi peraturan, akuntansi berbasis akrual semakin didorong untuk digunakan untuk laporan keuangan pemerintah di tingkat federal dan regional. analisis standar akuntansi pemerintah (2010: 21) Pada akhir penelitian ini, dapat terjadi kesimpulan dan implikasi mengenai fungsi laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi terkait mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan. Maksud administratifnya adalah untuk meringkas temuan penyelidikan dan memberikan beberapa komentar kantor. Organisasi manajemen mengawasi keuangan daerah yang digunakan untuk memperbaikinya. Untuk lebih jelasnya, skema berikut mewakili garis besar penulis tentang kerangka konseptual konseptual:

Gambar: Organisasi Konseptual

Keterangan gambar :



: Indikator Variabel



: Garis Pengaruh Parsial



; Garis Pengaruh Simutlan

2.9 Hipotesis Studi

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Marton,2010:57).

H1 : Hipotesis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo

H2 : Hipotesis Implementasi Pengolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Bajo

H3 : Hipotesis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Implementasi Pengolaan Keuangan berpengaruh secara simutlan terhadap kualitasn laporan Keuanagn kantor Camat Bajo

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang berbentuk kuantitatif dimana data kuantitatif berupa angka-angka, tabel-tabel dan sebagainya yang sedikit banyak menggunakan matematika. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan pada Kantor Camat Bajo. Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait pada judul penelitian ini direncanakan selama

1.3 Populasi dan Sampel

1.4

3.3.1 Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian atau, lebih umum, disebut sebagai wilayah generalisasi subjek/objek dalam penelitian dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dimiliki untuk digunakan sebagai tolok ukur bagi peneliti dalam menarik kesimpulan yang tepat sejalan dengan subjek penelitian. Populasi adalah seluruh rangkaian gejala atau unit yang harus diteliti, menurut Prasetyo dan Jannah (2010:119). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa populasi adalah komponen utama dari keseluruhan proyek penelitian. Adapun peserta dalam penelitian ini, khususnya para pengurus dan karyawan di Kantor Camat Bajo

3.3.2 Sampel

Populasi studi, di mana sampel penelitian adalah sampel yang representatif, mampu mewakili dirinya sendiri. Prasetyo dan Jannah (2010:119) menyatakan bahwa sampel adalah komponen

dari populasi yang sedang diselidiki. Sampel yang baik yang dipilih secara acak dan sesuai dengan tema yang dipilih. Personil dan kepemimpinan adalah sampel penelitian. pada Kantor Camat Bajo

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Akibatnya, informasi dan data yang dikumpulkan adalah yang dapat divalidasi. dipertanggungjawabkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data yang ada dengan memberikan informasi lebih lanjut. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, website, dan materi lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mendapatkan informasi menggunakan metode seperti beriku saya:

1. Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis literatur yang ada, termasuk buku, artikel, dan karya ilmiah yang secara langsung relevan dengan isu-isu yang sedang diteliti.

2. Lapangan

Studi ini mencoba mengumpulkan informasi yang tepat tentang ikhtisar perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kuesioner, yang merupakan lembar isian dengan item-item yang harus dijawab oleh responden dan yang berkaitan dengan penelitian, adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

3.6 Variabel penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) dan implementasi pengelolaan keuangan (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

- a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan utama penerapan standar akuntansi pemerintah adalah untuk membuat pembaca laporan keuangan lebih mudah dimengerti.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan (X2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang atau kelompok pemerintah yang bertempat tinggal di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sehubungan dengan pengelolaan keuangan dengan maksud untuk mencapai tujuan.
- c. Keakuratan akun keuangan sektor publik merupakan cerminan dari kondisi keuangan entitas pada transaksinya. Manajemen membuat laporan keuangan untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Selain itu, laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan tambahan, terutama sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan, sehingga ketersediaan laporan keuangan menjadi penting untuk memenuhi persyaratan pihak yang berkepentingan.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Penerapan SAP akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan	1.Laporan presentasi dan perencanaan realisasi anggaran. 2. Penyajian data secara menyeluruh seputar posting dalam laporan keuangan. 3.Mengelola dana kewajiban.	Skala likert

	laporan keuangan yang berkualitas dalam membentuk pemerintahan yang baik.	4. Manajemen Aset, Kewajiban, dan Modal	
Implementasi Pengelolaan Keuangan	Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Camat Bajo Medan yang digunakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011	1.Penyusunan anggaran. 2.Pelaksanaan anggaran. 3. Pembukuan dan penatausahaan 4.Pelaporan,pertanggungjawaban , dan pengawasan.	Skala likert
Kualitas Laporan Keuangan	. Dalam sehingga akuntansi informasi, jadilah normatif ukuran yang perlu direalisasikan Menurut standar akuntansi pemerintah, mencapai tujuan adalah tepat.	1.Memiliki nilai-nilai yang relevan. 2. Memiliki nilai untuk keandalan. 3. Mungkin dikontraskan. 4. Informasi dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.	Skala likert

3.7 Instrumen Penelitian

Skala *likert* digunakan untuk pengukuran sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Variabel yang digunakan dalam setiap pengukuran menggunakan modifikasi skala likert. responden akan memilih tingkat kesetujuan dan ketidak setujuannya terhadap pertanyaan tertentu. Skala *likert* akan dimodifikasi menjadi lima poin antara lain: Sangat tidak setuju (SS), sangat setuju (S), sangat tidak setuju (TS), dan setuju (S) (STS). Peringkat yang mungkin untuk tanggapan adalah SS (sangat setuju), yang diberikan nilai 4, S (setuju), yang diberi nilai 3, TS (tidak setuju), yang diberi nilai 2, dan STS sangat tidak setuju (STS), yang diberikan peringkat 1. (Juwita, 2017).

3.8 Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada Kepala Kantor Camat Bajo Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini untuk memberikan nilai ataupun skor dari pernyataan-pernyataan yang diajukan menggunakan skala likert.

3.8.1 Observasi

Observasi adalah proses atau objek yang bertujuan agar dapat merasakan kemudian memahami sebuah peristiwa, berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya serta untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian. Dalam penelitian observasi dapat berupa kuesioner, dilakukan dengan tes, serta rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena.

3.8.2 Uji Kualitas Data

Kaliber alat pengumpul data yang digunakan menentukan kaliber data penelitian. Instrumen yang sah adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur serta untuk memberikan data yang dapat diandalkan. Jika data yang digunakan dalam suatu penelitian kurang sah dan dapat diandalkan, hasilnya akan miring. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan asli dan dapat diandalkan, diperlukan tes kualitas data. Uji validitas dan uji reliabilitas adalah dua gagasan untuk mengevaluasi kualitas data.

a. Uji Validitas

Uji validas dapat digunakan dalam mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner. Keandalan sebenarnya mengacu pada keakuratan dan keandalan tindakan, yang mencakup gagasan pengukuran menyeluruh.

Pengukuran yang tidak realistis dapat mengakibatkan skor yang tidak dapat diandalkan karena ada varians individu dan faktor kesalahan (kesalahan) mempengaruhi skor lebih dari perbedaan aktual dalam faktor itu sendiri. Prosedur dalam pendekatan ini hanya memerlukan satu kali pengenaan tes pada sekelompok individu sebagai objek untuk melihat konsistensi antara butir (item) atau antar bagian dalam skala, karena pendekatan ini dipandang praktis, ekonomis, serta berefisien tinggi. Kriteria untuk penilaian uji validitas adalah

$R_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid

$R_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji pengukuran dan produksi yang diulang berkali-kali. Jika jawaban untuk setiap pertanyaan stabil dan konstan, kuesioner dapat dianggap realistis. Jika orang yang diukur tidak berubah dari waktu ke waktu dan pengukuran telah dilakukan pada kelompok peserta yang sama beberapa kali, temuan yang kira-kira konsisten dapat diharapkan dari pengukuran (Juwita, 2017) dan kriteria dalam uji reliabilitas

Pernyataan ini dapat diandalkan jika r_{alpha} positif dan lebih besar dari r_{table} . Pernyataan itu tidak dapat diandalkan jika r_{alpha} negatif dan kurang dari r_{table} .

a. Jika nilai Alpha Cronbach $> 0,6$ maka dapat diandalkan

b. Jika nilai Alpha Cronbach $< 0,6$ maka tidak dapat diandalkan Variabel ini dikatakan baik jika memiliki nilai alpha Cronbach $> 0,6$

(Priyatno, 2013: 30). 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Standar Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Distribusi data untuk model regresi adalah normal atau hampir normal. Uji normalisasi dijelaskan sebagai berikut oleh Danang Sunyoto (2016:92): "Selain uji asumsi multikolinearitas klasik dan heteroskedastisitas, uji asumsi

Tes normalitas, yang memeriksa data dari variabel terikat persamaan regresi yang dihasilkan (Y) dan variabel bebas (X), adalah klasik lainnya.

baik tersebar secara seragam atau tidak teratur. Data variabel bebas dan data variabel terikat harus didistribusikan agak normal atau tidak sama sekali, sesuai dengan persamaan regresi.

b. Uji Multikolinearitas Imam Ghozali (2013:105) menyarankan bahwa langkah-langkah berikut dapat diambil untuk menentukan apakah multikolinearitas ada di dalam model regresi:

1. Jika nilai perkiraan dari model regresi empiris cukup tinggi, meskipun banyak faktor independen tidak secara signifikan mempengaruhi variabel dependen ketika diambil secara terpisah

2. Periksa matriks korelasi variabel independen. Jika ada korelasi yang cukup tinggi (seringkali di atas 0,90) antara dua variabel independen, multikolinearitas hadir. Korelasi yang tinggi antara variabel independen bukanlah jaminan bahwa multikolinearitas tidak ada.

3. Bukti lain untuk multicholnearity meliputi: a) nilai toleransi dan antagonisnya A variation inflation factor (b) (VIF). Toleransi mengevaluasi variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel independen tambahan. Karena $VIF=1/\text{toleransi}$, nilai toleransi yang rendah sesuai dengan nilai VIF yang tinggi. Prosedur berikut dapat digunakan untuk menguji

multikomlinearitas :

- a) Multicholnearity terjadi ketika nilai toleransi kurang dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10.

- b) Nilai toleransi $> 0,10$ atau VIF 10: Multikolinearitas tidak diamati pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

c. Ujiheteroskedastisitas, menurut Ghozali (2012: 139), "bertujuan untuk menilai apakah ada ketidaksetaraan variasi residual satu pengamatan ke yang lain dalam model regresi." Jika

variasi residual ,antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya masih ada, maka dikenal sebagai heteroskedastisitas, kadang-kadang dikenal sebagai heteroskedastisitas jika diperlakukan berbeda. Suyoto (2007: 94) menegaskan bahwa heteroskedastisitas memanifestasikan dirinya ketika scatterplottics menunjukkan pola yang sering menyempit, melebar, atau bergelombang-gelombang.

d. Analisis Regresi Berganda Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat keterkaitan kausal antara ketiga variabel tersebut atau untuk melihat seberapa besar dampak Standar Akuntansi Pemerintah x_1 dan Manajemen Pelaksanaan Keuangan x_2 terhadap variabel dependen, yang merupakan variabel dependen di sini (Kualitas Laporan Keuangan Y). Seperti yang dinyatakan oleh Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk mencari pengaruh antara satu variabel dependen dua atau lebih variabel independent dan dua atau lebih variabel independent akan mempengaruhi variabel dependen. Regresi linear berganda merupakan metode yang akan meneliti ada tidaknya hubungan antara satu kejadian dengan jumlah kejadian yang lain. Data yang digunakan biasa berskala interval atau rasio. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan implementasi pengolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuanga pada kantor camat bajo

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Keuangan

X_1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X_2 = Implemtasi Pengolaan Keuangan

3.8.4 Uji Hipotesis

a. Uji R^2

Uji Koefisien Determination (R) adalah perbandingan variasi Y (dependen) sebagaimana dinyatakan oleh X. (independen). Dalam rumusan ini diperkenalkan persentase tipe variabel independen yang dapat digunakan dalam model untuk menggambarkan tipe variabel dependen (Wijaya, 2012:104). Koefisien penentuan memiliki nilai antara 0 dan 1. Angka yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat dibatasi. Hampir satu nilai menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan fluktuasi variabel dependen disediakan oleh variabel independen.

b.Uji T (Parsial)

tesnya digunakan untuk menentukan apakah variabel independen regresi dalam model memiliki dampak yang berarti pada variabel dependen. Ada pengaruh

parsial dari variabel independen pada variabel dependen jika t menghitung $> t$ dari tabel atau Sig.: 0,05. Sebaliknya, tidak ada pengaruh parsial dari variabel independen dari variabel dependen jika t menghitung t dari tabel atau Sig. $> 0,05$

c.Uji F (Uji Simultan)

Tujuan dari tes ini adalah untuk menentukan apakah interaksi antara variabel bebas memiliki dampak yang berarti pada variabel terikat. Dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat kesalahan analitis (α) = 5%, tingkat bebas pembilang $df1 = (k-1)$, dan tingkat penyebut bebas $df2 = (n-k)$, di mana k menunjukkan jumlah parameter koefisien dalam model regresi linier dan n menunjukkan jumlah pengamatan, tes ini dijalankan. (Derry, 2020).

Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut:

Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya semua variabel indeviden/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel defenden/terikat.

Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat

3.8.5 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi liner berganda melalui program SPSS versi 23 ada beberapa tahap analisis yang dilalui dalam teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis

data dalam penelitian seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, *mean* dan *standarddeviation*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Camat Bajo

Bajo adalah salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan Distrik Luwu dari waktu ke waktu, dimulai dengan sejarah keturunan Batara Guru di lapangan. Masyarakat daerah ini menjunjung tinggi adat yang merupakan sumber "Abbatireng Wija To Luwu" yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Bajo merupakan daerah asal Penduduk setempat mempertahankan tradisi yang memunculkan "Abbatireng Wija To Luwu," yang akhirnya meluas ke bagian lain Sulawesi Selatan. Bajo adalah salah satu pusat pendidikan dan politik utama selama transisi dari monarki ke republik, dan kemudian menjadi kecamatan selama pendirian resmi kabupaten Luwu.

4.1.2 Tugas Dan Fungsi Kantor Camat bajo

a. Tugas Kantor Camat bajo

1. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan ruang lingkup kecamatan dalam merencanakan forum diskusi di desa/kelurahan dan kecamatan:
2. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh unit kerja.
3. Program kerja dan kegiatan yang ditawarkan oleh sektor publik dan swasta
4. mendorong pelibatan masyarakat dalam kesempatan berkarir di kecamatan
5. menilai inisiatif keterlibatan masyarakat daerah
6. kabupaten, dilakukan oleh organisasi keria nublik dan komersial;
7. melaksanakan tanggung jawab t..... p.....ayaan masyarakat lebih lanjut sesuai dengan
8. peraturan perundang-undangan;
9. laporan inisiatif pemberdayaan masyarakat daerah kerja kabupaten

10. kepada bupati dengan salinan kepada unit kerja aparaturnya yang bertanggung jawab atas masalah pemberdayaan masyarakat

b. Fungsi Kantor Camat Bajo

dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan. pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; penyusunan pemberdayaan masyarakat di bidang pekerjaan yang diselenggarakan oleh semua instansi; koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; koordinasi upaya menjaga perdamaian dan ketertiban umum;

koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan pelayanan publik, pengembangan administrasi pemerintahan desa dan/atau desa, pengabdian kepada masyarakat yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau desa, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan:

4.1.3 Visi Dan Misi Kantor Camat Bajo

a. Visi

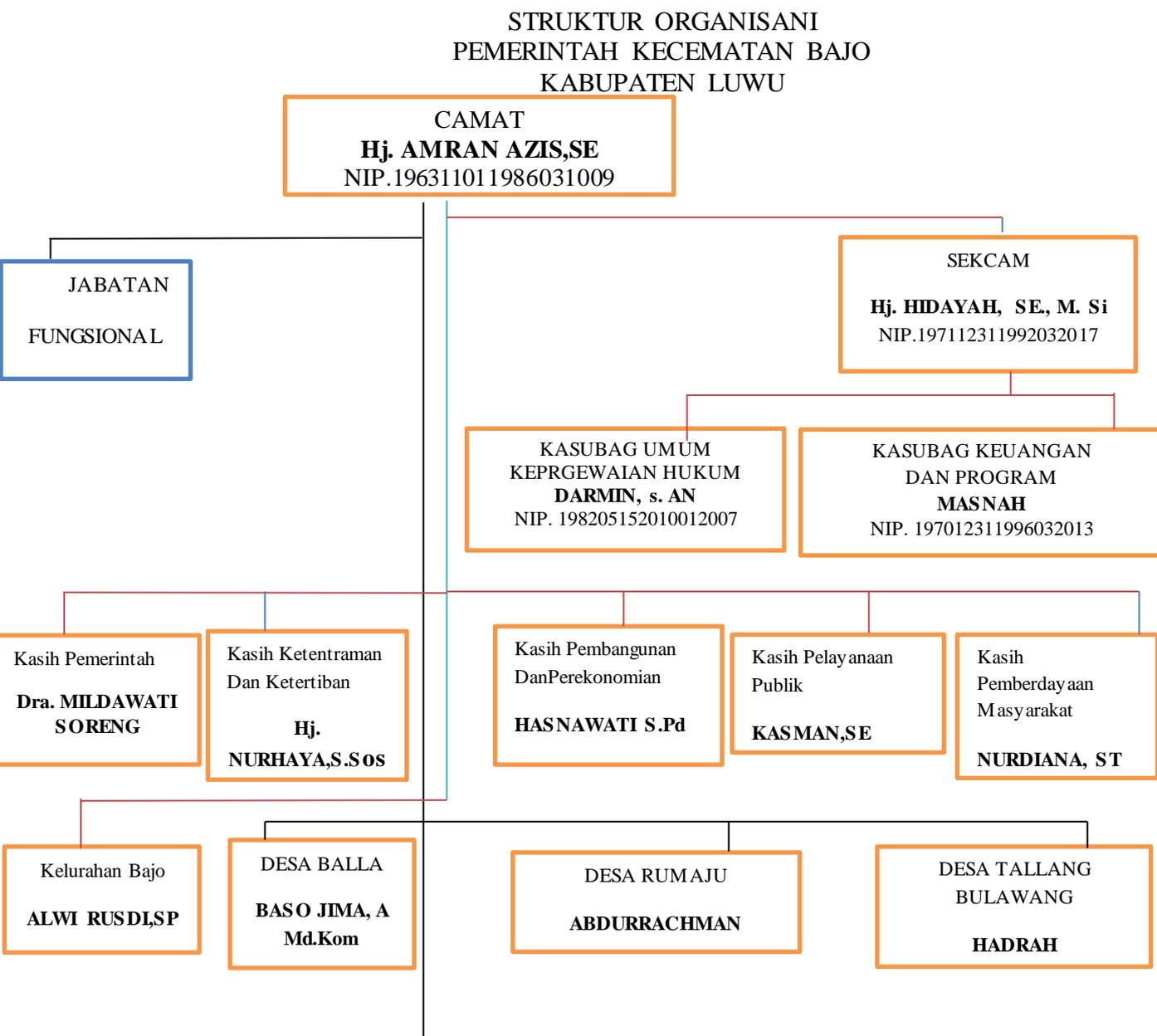
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing; mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya; mewujudkan terciptanya kota yang bersih, hijau, aman, dan tertib; mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh teknologi dan aparatur informasi dengan integritas yang bersih dan cerdas; dan perlindungan anak.

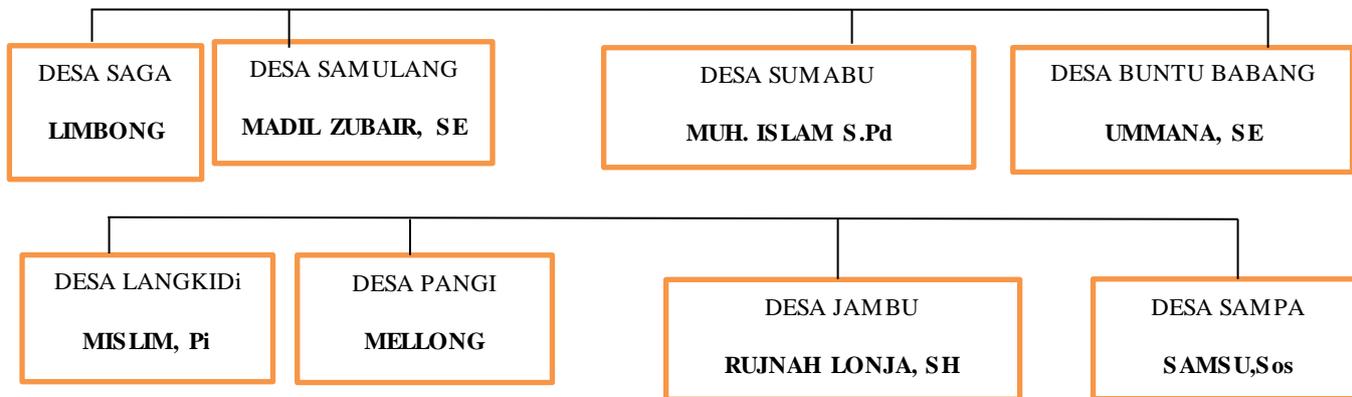
b. Misi

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya dan menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang

berintegritas bersih dan cerdas mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri kreatif dan berdayasaing mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Camat Bajo





Gambar Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bajo

4.2 Analisis Deskriptif Data

Analisis statistik deskripsi yaitu untuk menjelaskan karakteristik responden melalui jenis kelamin, umur dan masa kerja. Dalam penelitian ini responden Pada penelitian ini, penelitian memperoleh data dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada Kantor Camat Bajo.

4.2.1 Analisis Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden

Adapun tabel karakteristik responden yang berdasarkan jenis kelamin, umur dan masa kerja ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

No	Usiah	Frekuensi	Persentase
1	18-23 Tahun	5	13%
2	25-30 Tahun	10	30%
3	31-45 Tahun	20	57%
Total		35	100%

Sumber: data responden yang diolah (2022)

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki- Laki	30	83%
2	Perempuan	5	17%
Total		35	100%

4.2.3 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas seseorang dapat ditentukan melalui tes validas dan kuesioner yang valid. Jika pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan informasi yang dapat diukur dengan kuesioner, koesioner dikatakan valid. Realibilitas benar-benar mengacu pada keakuratan dan keandalan hasil pengukuran, yang mencakup gagasan pengukuran yang cermat. Pengukuran yang tidak realistis dapat mengakibatkan skor yang tidak dapat diandalkan karena ada varians individu dan faktor kesalahan (kesalahan) mempengaruhi skor lebih dari perbedaan aktual dalam faktor itu sendiri.. Prosedur dalam pendekatan ini hanya memerlukan satu kali pengenaaan tes pada sekelompok individu sebagai objek untuk melihat konsistensi antata butir (item) atau antar bagian dalam skala, karna pendekatan ini dipandang praktis, ekonomis, serta berefisien tinggi. Kriteria untuk prenilaian uji validitas berikut hasil uji validitas penelitian ini;

Tabel 4.3

No.	Variabel	Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1.	Penerapan Standar Akuntansi pemerintah	X ₁ .1	0,722	0,339	Valid
		X ₁ .2	0,569	0,339	Valid
		X ₁ .3	0,711	0,339	Valid
		X ₁ .4	0,851	0,339	Valid
		X ₁ .5	0,716	0,339	Valid
2.	Implementasi Pengolaan Keuangan	X ₂ .1	0,685	0,339	Valid
		X ₂ .2	0,748	0,339	Valid
		X ₂ .3	0,743	0,339	Valid
		X ₂ .4	0,668	0,339	Valid
		X ₂ .5	0,555	0,339	Valid
3.	Kualitas Laporan Keuangan	Y ₁ .1	0,595	0,339	Valid
		Y ₁ .2	0,674	0,339	Valid
		Y ₁ .3	0,683	0,339	Valid

		Y _{1.4}	0,623	0,339	Valid
		Y _{1.5}	0,478	0,339	Valid

Sumber Data Diolah di SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap tiga (3) variabel dalam penelitian ini dapat dilihat bahkan semua dinyatakan valid dimana r hitung $>$ dari tabel pada signifikan 5%

b. Uji Realibilitas

Uji Realibitas merupakan ukuran suatau kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk – konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan susunan dalam bentuk kuesioner . dalam uji realibitas teknik cronbach'salph $>$ 0,6 dan dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.4 Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Standar Akuntansi Pemerintah	0,761	Reliable
2	Implementasi Pengolaan Keunagan	0,669	Reliable
3	Kualitas Laporan Keuangan	0,725	Reliable

Sumber Data Diolah di SPSS (2022)

Berdasarkan pada uji reabilitas diatas menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan Implementasi Pengolaan Keuangan dan kualitas Laporan Keuangan memiliki *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,6 sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliable (layak).

4.2.2 Uji Asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi data suatu kelompok atau variabel data secara normal didistribusikan atau tidak. Jika distribusi data normal diwakili oleh kurva, itu akan menyerupai bel, dengan dua bagiannya meleleh menjadi tak terhingga. Tes Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penyelidikan ini untuk menentukan apakah data didistribusikan secara normal atau tidak, dengan peringatan bahwa data dianggap didistribusikan secara normal jika nilai probabilitas (Asymp.Sig) lebih besar dari 0,05. Informasi berikut disajikan dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,97
	Std. Deviation	1,963
Most Extreme Differences	Absolute	0,118
	Positive	0,118
	Negative	-0,110
Test Statistic		0,118
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber data skunder diolah, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 dengan nilai probabilitas 0,200. Setelah ditentukan bahwa data didistribusikan secara normal, tes Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk membuat pilihan.

2. Uji Multikolinearitas

Tes multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah variabel bebas dalam model regresi memiliki tingkat asosiasi yang tinggi atau tidak. Periksa toleransi setiap variabel dan nilai VIF dalam kaitannya dengan variabel terikat dan bebasnya untuk memverifikasi hal ini. Model tidak memiliki multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih

rendah dari 0,10. Berikut ini adalah hasil penggunaan aplikasi SPSS versi 23 untuk mengolah data.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolineartas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardi zed Coefficients		Standardi zed Coefficie nts	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleran ce	VIF
1	(Constan)	8,412	4,191		2,007	,053		
	X1	0,289	0,124	0,363	2,325	0,027	0,997	1,003
	X2	0,293	0,143	0,321	2,056	0,048	0,997	1,003

umber: Data sekunder diolah, 2022

Hal ini berkaitan dengan dasar keputusan pengambilan dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai toleransi dan VIF, dan dapat disimpulkan dari tabel 4.2 bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinearitas. Berdasarkan nilai toleransi masing-masing variabel (X1) dan (X2) sebesar $0,997 > 0,10$ Sedangkan nilai VIF untuk setiap variabel adalah $1,003 > 0,10$, ini menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak ada.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tes ini dirancang untuk menentukan apakah ketimpangan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya terjadi dalam model regresi. Heteroskedasticity adalah istilah statistik yang digunakan ketika variabel yang sama (konstan atau tetap) muncul dalam model regresi. Terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi diharapkan. Untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Regresi variabel independen terhadap residu absolut digunakan untuk melakukan pengujian ini. Batasannya adalah bahwa heteroskedastisitas tidak ada jika probabilitas nilai lebih besar dari alfa ($\text{Sig} > 0,05$), dan sebaliknya. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastistas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,412	4,191		2,007	0,053
	X1	0,289	0,124	0,363	2,325	0,027
	X2	0,293	0,143	0,321	2,056	0,048

Sumber hasil olahan data SPSS 2022

Mengingat hasil output di atas dan pengetahuan bahwa nilai signifikan (sig) dari variabel (X1) dan (X2) sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan dalam tes gleser, dapat dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas yang ada.

4.2.4 Analisis Regresi Liner Berganda

Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel independen, bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi(dinaik turunkan nilainya)

Tabel 4.8 Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,412	4,191		2,007	0,053
	X1	0,289	0,124	0,363	2,325	0,027
	X2	0,293	0,143	0,321	2,056	0,048

a. Dependen ; y

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + e$$

$$Y = 8,412 + 0,289 X_1 + 0,293 X_2$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 8,412 bernilai positif yang artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan implementasi pengolaan keuangan bernilai 0 maka kualitas laporan keuangan tetap bernilai 8,412
- b. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) mengalami kenaikan sebesar 0,264 yang artinya jika penerapan standar akuntansi pemerintah mengalami kenaikan 1%, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,289 dengan asumsi bahwa implementasi pengolaan keuangan (X2) bernilai konstan.
- c. Koefisien regresi variabel implementasi pengolaan keuangan (X2) mengalami kenaikan sebesar 0,293 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami kenaikan 0,293 dengan asumsi bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) bernilai konstan.

4.2.5 Koefisien Determinasi

Bertujuan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen, menjelaskan variabel dependen yang dilihat melalui *R Square*.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,472	0,222	0,174	1,784

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.5 maka diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,222 (0,222%) hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.222%

sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Uji T

Tes ini digunakan untuk menentukan apakah variabel independen regresi dalam model memiliki dampak yang berarti pada variabel dependen. Ada pengaruh parsial dari variabel independen pada variabel dependen jika t menghitung $> t$ tabel atau Sig.: 0,05. Sebaliknya, tidak ada pengaruh parsial dari variabel independen dari variabel dependen jika t menghitung t tabel atau Sig. $> 0,05$.

Tabel 4.10 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,412	4,191		2,007	0,053
	X1	0,289	0,124	0,363	2,325	0,027
	X2	0,293	0,143	0,321	2,056	0,048

a. Berdasarkan tabel di atas pada kolom t dan signifikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan hal ini dapat dilihat hipotesis yang pertama diketahui untuk penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) t hitung = 2,325 $> t$ tabel = 0,339 dengan signifikan 0,027 $< 0,05$ artinya penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

b. Berdasarkan tabel di atas pada kolom t dan signifikan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat Hipotesis yang kedua untuk variabel implementasi pengelolaan keuangan (X2) $t_{hitung} = 2,056 > t_{tabel} = 0,339$ dan signifikan $0,048 < 0,05$ artinya variabel implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Parsial

Variabel	Hasil Output SPSS	Sig	Keterangan
X1	0,027	0,05%	Berpengaruh signifikan
X2	0,048	0,05%	Berpengaruh signifikan

4.2.7 Uji Simultan (F)

Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Tes ini digunakan untuk mendeteksi pengaruh semua faktor independen secara bersamaan atau kolektif terhadap variabel dependen hingga jumlah yang signifikan 5%.

Tabel 4.12 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,130	2	14,565	4,577	,018 ^b
	Residual	101,841	32	3,183		
	Total	130,971	34			

a. Dependen Variabel ;y

b. Predictor; (constant), X2 X1

Berdasarkan tabel di atas, nilai F Calculate ditemukan sebesar 4,577 dan F Tabel 4,7 pada tingkat yang signifikan sebesar 5% sebesar 4.577 sedangkan nilai signifikan sebesar 0,018, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F yang dihitung adalah 4,577 F Tabel adalah 5,32 dan nilai sig sebesar $0,018 > 0,05$ sehingga variabel penerapan standar akuntansi pemerintah

dan pelaksanaan pengelolaan keuangan bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan

4.3 Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (x1) memiliki hitung T hitungan sebesar 2,325 dan nilai signifikansinya sebesar 0,027 maka hipotesis yang diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya . jika signifikasinya lebih kecil tau sama dengan 0,05 (0,05) maka hipotesis diterima .hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,486 >0,05 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan sangat pengaruhi kualitas laporan. Jelaskan bagaimana keberadaan standar, yang digunakan sebagai tolok ukur untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, menunjukkan bahwa laporan keuangan berkualitas tinggi. Mereka juga memberikan indikasi apakah setiap kegiatan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah atau tidak.

Hasil Penelitian Permana (2011), Kusumah (2012), Juwita (2013), dan Rahayu, dkk. (2014) juga sampai pada kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh penggunaan standar akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan akuntansi pemerintah sudah mapan. kualitas laporan keuangan semakin baik karena pada dasarnya kualitas laporan keuangan yang baik adalah sesuai dengan SAP yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

2. Implementasi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah untuk menguji implementasi pengelolaan keuangan memiliki nilai T_{hitung} sebesar 2,325 dan nilai signifikansinya sebesar 0,056 pada tingkat signifikansi 0,05 artinya bahwa $0,056 < 0,05$ maka Hipotesis H2 yang berbunyi implementasi pengelolaan keuangan diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2006:64) implementasi dijelaskan Van Meter dan van Horn mengklaim bahwa implementasi mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu, otoritas, pemerintah, atau entitas swasta yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan Van Meter dan van Horn (Wahab, 2006: 65). Mempraktikkan manajemen keuangan dapat KPU Nomor 94/Kpts/KPU/ Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Keputusan pemilihan, yang dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan keuangan oleh pejabat atau kelompok pemerintah perorangan yang bertempat tinggal di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dalam keputusan kebijakan.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, nilai F Calculate ditemukan sebesar 4,577 dan F Tabel 4,7 pada tingkat yang signifikan sebesar 5% sebesar 4,577 sedangkan nilai signifikan sebesar 0,018, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F yang dihitung adalah 4,577 F Tabel adalah 5,32 dan nilai sig sebesar $0,018 > 0,05$ sehingga variabel aplikasi standar akuntansi pemerintah dan pelaksanaan pengelolaan keuangan bersama-sama mempengaruhi

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Temuan studi yang diterbitkan oleh Purwanti Nugraheni pada tahun 2008 dengan judul *The Influence of the Application of Government Accounting Standards on the Quality of the Report* ini menunjukkan bagaimana penggunaan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kaliber laporan keuangan. juga, berdasarkan Purwaniati dan Inmam Subaweh (2008) dalam penelitian ini menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan kesimpulan yang sama juga diperoleh dalam penelitian Christant (2012) pada biro keuangan setda pemerintah provinsi Jawa Barat. Kusuma (2010) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada daerah (LKPD) disajikan dalam kategori yaitu opini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor camat bajo hal ini dikarenakan pemerintahan telah melaksanakan tentang standar akuntansi pemerintah dengan baik guna meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
2. Berdasarkan hasil uji kofosien derterminasi pada tabel 4.5 maka diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,222 (0,222%) hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.222% sedangkan sisanya sebesar 72% diijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

5.2 Saran

Pemerintah mengantisipasi bahwa penelitian akan digunakan untuk menerapkan standar akuntansi karena sudah berdiri untuk mencapai tujuan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Kantor Camat Bajo agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya sehingga dapat melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberi masukan (*consulting assurance*)

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Ardi, Kusumah. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya. Skripsi Jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi: Universitas Siliwangi.
- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar.2012. Pengaruh Penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi : Volume 1, Nomor 1, November 2013.
- Dhedy, Triwardana. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan SPKD. Jurnal JOM: Volume 4, Nomor 1, Februari 2017.
- Erna sari, Saiful, Nila Aprila. 2013. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Daerah. Jurnal Fairness: Volume 3, Nomor 3, November 2013.
- Ghozali 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19.Edisi Kelima. UNDIP. Semarang.
- Kusumah, Arif A 2012. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD pemerintah kota Tasikmalaya. Jurnal Akuntansi : Volume IX, Nomor 2, November 2013.
- M.Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR.Sri Pancawati Martiningsih. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9, Nomor 1, April 2016.
- Mahmudi,2010.Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. UPP STIM.Yogyakarta .
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mia Oktarina, Kharis Raharjo, Rita Andini. 2016. di Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan kota Semarang. Jurnal of accounting: Volume 2, Nomor 2, Maret 2016.
- Mochamad Iqbal, Alfarisyi. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Skripsi Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Bandung.

- Ovita Charolina, Husaini, Abdullah. 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Jurnal Fairness: Volume 3, Nomor 3*, November 2013.
- Purwanati Nugraheni, Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis: Nomor 1, Volume 13*, April 2008.
- Puji, Santoso. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyoo. 2013. *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ketiga. Alfabeta : Bandung.
- Sultan, S., & Supri, Z. (2021). Pengaruh Intellectual Capital Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan \Sebagai Variabel Mediasi. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 112-130.
- Supri, Z., & Syamsuddin, S. (2022). Kemampuan Laba Kotor, Laba Operasi, Laba Bersih dan Perubahan Piutang dalam Memprediksi Arus Kas Operasi di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 9(1), 137-150.
- Tanjung, A. Hafiz. 2008. *Akuntansi pemerintahan daerah, konsep dan aplikasi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Cetakan kedua. Alfabeta: Bandung.
- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis Pascasarjana: USU Medan
- Yusup, Komarudin. 2010. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.